

## DINAMIKA PERAN PEREMPUAN SUNDA DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK ERA MODERN

*Jurnal Analisa Sosiologi*  
April 2023, 12 (2): 410- 430

Dini Asmiatul Amanah<sup>1</sup>, Siti Nurbayani K.<sup>2</sup>, Siti Komariah<sup>3</sup>, Restu Adi Nugraha<sup>4</sup>

### **Abstract**

*The involvement of women in politics is crucial for democracy. In the mythology and philosophy of Sundanese culture, women have a respected role and status in society that is equal to men. However, with the emergence of patriarchal culture during feudalism, women were placed as a subordinate class and men were deemed more suitable for leadership and decision-making in public affairs. This research examines the positive shift in social construction and Sundanese values regarding the leadership of Sundanese women and their role in modern politics. The research method used is a qualitative approach with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews with legislators, observation, and literature studies. The results show that in the modern era, there has been a positive shift in the social construction and cultural values of women's leadership in the political sphere. The public's view is becoming more open that women can be good leaders in the public domain, supported by the performance of Sundanese women legislators who exhibit political values such as awareness, openness, consultation, and flexibility in communication. However, Sundanese women still face obstacles in entering politics, especially issues of courage and self-confidence. Therefore, efforts are needed to increase awareness, knowledge, and skills of women in politics through the community, education, and organizations that support women as political leaders.*

**Keywords:** Leadership, Politics, Women, Sundanese

### **Abstrak**

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik merupakan hal yang penting bagi demokrasi. Dalam mitologi dan filosofi kebudayaan Sunda, perempuan Sunda memiliki peran dan kedudukan terhormat dalam masyarakat yang setara dengan laki-laki. Namun, seiring masuknya budaya patriarki pada masa feodalisme, menempatkan perempuan sebagai subjek kelas dan laki-laki yang lebih layak menjadi pemimpin dan *decision making* dalam urusan publik. Penelitian ini mengkaji pergeseran konstruksi sosial dan nilai-nilai kesundaan dalam kepemimpinan perempuan sunda dan peran perempuan sunda dalam politik era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota legislatif, observasi dan studi literatur. Hasilnya bahwa di era modern, terjadi pergeseran positif dalam konstruksi sosial budaya mengenai kepemimpinan perempuan di dunia politik. Pandangan masyarakat semakin terbuka bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang baik di ranah publik, yang didukung oleh kinerja anggota legislatif perempuan Sunda yang menunjukkan nilai-nilai politik seperti kesadaran, keterbukaan, musyawarah, dan fleksibilitas dalam berkomunikasi. Meskipun demikian, perempuan Sunda masih menghadapi kendala dalam memasuki dunia politik, terutama masalah keberanian dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan perempuan dalam politik melalui lingkungan masyarakat, pendidikan, dan organisasi yang mendukung perempuan sebagai pemimpin politik.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Politik, Perempuan, Sunda

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>1</sup> Correspondence email: [diniasmiatul@student.upi.edu](mailto:diniasmiatul@student.upi.edu)

## PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kehidupan yang demokratis. Dalam parlemen keterwakilan perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan (Priandi & Roisah, 2019). Partisipasi perempuan ini penting untuk pengambilan keputusan yang lebih akomodatif dan substansial untuk mewakili kebutuhan perempuan itu sendiri secara khusus, dan membangun kehidupan yang setara secara umum. Kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik telah diakomodasi melalui produk kebijakan afirmasi di berbagai negara (Rosen, 2017). Sayangnya, keterwakilan perempuan dalam ranah politik belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada perempuan Sunda. Tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik ini umumnya bersifat kultural (Patimah, 2022).

Dalam mitologi Sunda, perempuan Sunda dengan nilai-nilai kesundaan yang luhur memiliki potensi untuk tampil sebagai pemimpin. Dalam kepemimpinannya, perempuan sunda mengambil nilai-nilai falsafah Sunda untuk meningkatkan kualitas dirinya. Secara sosiologis-antropologis, dalam falsafah kehidupan masyarakat Sunda terdapat nilai yang harus dimiliki pemimpin, baik perempuan maupun laki-laki yakni *cageur, bageur, bener, pinter, tur singer* (Engkoswara, 2022). Namun, pada konteks zaman yang berbeda terjadi dinamika peran perempuan Sunda di ranah publik yang tidak terlepas dari aspek sosiologis dan budaya pada masyarakat. Di era modern, perempuan Sunda sudah berperan secara signifikan di ruang publik, tidak hanya sebatas pada ruang domestik. Namun, dalam urusan kepemimpinan di ruang publik, sering kali perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (*the second sex*) (Wadanubun dkk, 2020). Misalnya dalam masyarakat sunda yang masih lekat dengan budaya patriarkinya, menempatkan laki-laki dalam kepemimpinan lebih menonjol dibandingkan perempuan (Haddad & Hijran, 2018).

Dalam bidang politik, laki-laki sering dianggap lebih layak memimpin disebabkan konstruksi sosial yang menganggap laki-laki lebih memiliki karakter kepemimpinan seperti lebih kuat, berani dan mampu berpikir logis (Hartono, 2021; Sastrawati, 2018). Sedangkan tidak jarang

perempuan diidentikan sebagai makhluk yang lemah dan perasa dan kurang produktif sehingga kurang layak menduduki kepemimpinan tertinggi di ruang publik (Mauliyah & Sinambela, 2019). Bahkan, konstruksi sosial tersebut seringkali dibangun oleh perempuan itu sendiri. Perempuan sendiri seringkali kurang percaya diri dalam bersuara di ranah publik dan lebih memilih laki-laki untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di ruang publik (Kirwanto, 2018). Padahal, pada mitologi dan filosofi kebudayaan Sunda dari zaman dahulu, perempuan Sunda memiliki peran dan kedudukan terhormat dalam masyarakat yang setara dengan laki-laki.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Istianah Tahun 2020 yang berjudul “Perempuan dalam System Budaya Sunda: Peran dan Kedudukan Perempuan di Kampung Geger Hanjuang Leuwisari Tasikmalaya” Sistem kekerabatan Suku Sunda yang bersifat parental, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu bersama secara tidak langsung mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam sistem peradaban. Selain itu, masyarakat Sunda yang mayoritas menganut agama Islam juga sejak dahulu banyak menerapkan kebudayaan dan ajaran islam yang juga menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan terhormat dan diakui peran pentingnya. Namun dalam perkembangannya terjadi pergeseran peran dan posisi perempuan ini dipengaruhi oleh percampuran budaya Sunda dengan budaya Arab yang patriarki pada masa penyebaran Agama Islam. Kemudian dipengaruhi juga oleh masuknya pengaruh budaya Jawa pada masa penyerangan Mataram ke Wilayah Sunda yang mengkonstruksi kepemimpinan adalah urusan laki-laki, sedangkan perempuan lebih tepat mengurus urusan domestik (Isti'anah, 2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi pada tahun 2018 dengan judul "Perang Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," peran dan posisi kaum perempuan di Indonesia mengalami diskriminasi yang kentara. Hak-hak asasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, terutama terkait masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik, seringkali tidak diakui. Namun, sayangnya, banyak perempuan Indonesia yang tidak memahami hak-hak mereka. Masih banyak terjadi diskriminasi gender dalam politik Indonesia. Bahkan, kaum perempuan di

Indonesia, meskipun mayoritas, masih kurang terlibat dalam wacana politik dan memiliki peran serta posisi yang minim dalam pengambilan kebijakan. (Wahyudi, 2018).

Batuwael, dkk dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 terkait “Persepsi Masyarakat Wahaeolon terhadap peran dan kedudukan perempuan moodern di Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan” menjelaskan bagaimana pandangan kumulatif masyarakat Wahaeolon terhadap peran dan eksistensi perempuan dikehidupan sehari-hari. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari perempuan mendapatkan tuduhan miring bahwa perempuan di desa Wahaeolon Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan tidak bisa diandalkan dalam berbagai proses kegiatan yang berlangsung di desa Wahaeolon mereka kaum laki-laki beranggapan bahwa kegiatan yang cocok untuk mereka (perempuan) tidak lain tidak bukan hanya mampu di dapur saja, sehingga bila ada proses atau kegiatan yang terjadi di desa hanya diandalkan kaum laki-laki saja mereka tidak mempesertakan perempuan di dalamnya karena mereka menganggap bahwa perempuan tidak mampu (tidak berpotensi) dalam hal-hal tersebut. (Batuwael, 2023).

Saputri dan Mardijono dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 terkait “Syarat Berpenampilan Menarik Pada Pendaftaran Calon Mahasiswa Sebagai Salah Satu Diskriminasi Di Dunia Pendidikan.” Menjelaskan bagaimana pandangan perempuan dilihat dari aspek pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat persyaratan berpenampilan menarik dalam bidang akses terhadap Pendidikan tentu saja merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan berpenampilan menarik yang hanya diberlakukan pada siswa saja. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak adil dan tidak seimbang antara siswa dan guru. Siswa harus mengikuti aturan berpenampilan menarik, sementara guru tidak. Ini sangat tidak adil dan bisa menimbulkan rasa tidak puas bagi siswa. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa rendah diri dan bahkan stereotip tentang bagaimana orang harus berpenampilan. (Saputri & Mardijono, 2023).

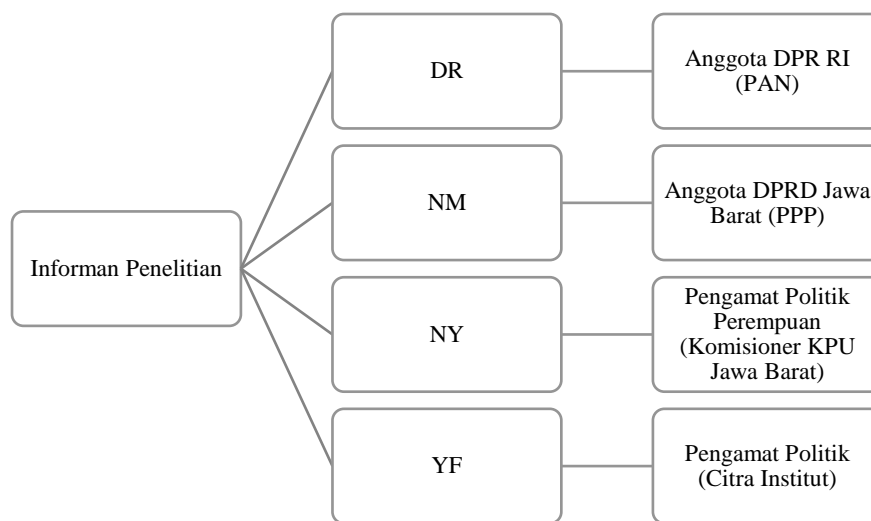
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Larashati pada tahun 2022 mengenai "Ketimpangan dan Peningkatan Kesetaraan Gender dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*)," dijelaskan bagaimana peran perempuan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jumlah perempuan yang bekerja dengan laki-laki, dengan persentase 43,39% berbanding 36,2%. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya di beberapa wilayah Indonesia, di mana perempuan lebih diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak daripada mencari nafkah. Selain itu, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak perempuan dan ekspektasi masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga juga berpengaruh. (Larashati, 2022).

Berdasarkan beberapa analisis penelitian terdahulu terkait peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang politik, pendidikan hingga ketenagakerjaan. Dapat tergambar jelas bahwa diskriminasi terhadap hak perempuan masih sering terjadi. Hal tersebut, harus menjadi landasan untuk melakukan kajian terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, khususnya aspek politik. Karena menjadikan perempuan sebagai pemimpin sama dengan berinvestasi sumber daya dalam membangun kehidupan yang demokratis. Sejatinya perempuan pun memiliki kemampuan dan dibutuhkan peranannya dalam organisasi politik (Suarmini, 2021). Dari studi pendahuluan yang dipaparkan di atas, belum ada yang mengkaji mengenai bagaimana kepemimpinan perempuan Sunda dalam politik era modern dibangun. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini adalah berusaha mengkaji mengenai nilai-nilai kesundaan dan peran perempuan Sunda di Lembaga Legislatif dewasa ini dalam konstruksi sosial budaya saat ini di tengah keterbukaan akses informasi dan komunikasi dan prinsip demokratis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi literatur dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

analisis kualitatif deskriptif. Dalam melakukan analisis data kualitatif, dilakukan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Anggota legislatif perempuan yang lahir di sunda atau dibesarkan dengan orang tua yang berasal dari sunda. 2) Anggota legislatif perempuan yang berada di daerah pemilihan Jawa Barat. 3) Pengamat politik laki-laki dan perempuan.



**Gambar 1. Informan Penelitian**

*Sumber: Amanah, DA., dkk., 2023*

Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari anggota legislatif perempuan sunda sejumlah 4 orang dari 4 partai berbeda, menggunakan instrumen yang memberikan sejumlah pertanyaan yang sama kepada setiap responden. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada 1 orang pengamat politik perempuan dan 1 orang pengamat politik laki-laki agar diperoleh pandangan yang tidak bias gender. Jadi total informan dalam penelitian ini adalah 6 informan.

Adapun Studi literatur dilakukan dengan cara mencari literatur dari sumber buku dan artikel jurnal dengan rentang tahun 2018-2022. Observasi dilakukan kepada perempuan sunda yang saat ini menduduki jabatan di lembaga legislatif, khususnya di DPRD Jawa Barat dan DPR RI. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dilakukan analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif merujuk pada model analisis Miles dan

Huberman (dalam Moelong, 2017) yang terdiri dari: 1) Reduksi Data/Pemilihan Data. 2) Penyajian Data. 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Moelong, 2017). Selanjutnya peneliti melakukan validitas data dengan teknik triangulasi, yaitu mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi literatur, dan observasi untuk mendapatkan hasil penelitian (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan catatan sejarah perempuan dan laki-laki dalam kebudayaan Sunda yang luhur memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Berdasarkan *folklor* dan naskah filologi yang ditulis oleh perempuan Jawa Barat, “mayoritas perempuan Sunda kuno digambarkan memiliki citra yang baik, posisi yang terhormat, dan setara dengan laki-laki. Pada masa Sunda kuno pernah berkembang budaya matriarki dimana perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari laki-laki.” (Istianah, 2020).

Kedudukan penting perempuan sunda dapat dilihat dari mitologi sunda yang berkembang, misalnya seperti “konsep Ambu (Ibu) dalam kepercayaan masyarakat *Kanekes* atau *Baduy* yang menempatkan perempuan pada posisi penting. Dalam kepercayaan mereka, Ambu memiliki fungsi dan peran yakni sebagai pemelihara, pengayom, dan pelindung, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan ladang tetapi juga merupakan penguasa dan pengayom masyarakat (Hak, dkk., 2023). Dalam konsep tersebut, kedudukan perempuan tidak menjadi “bawahan” laki-laki, tetapi berada dalam posisi yang lebih terhormat.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman tepatnya pada zaman feodal (abad ke-19 dan awal abad ke-20) kedudukan perempuan dalam kebudayaan sunda mengalami pergeseran, kedudukannya sangat lemah dan terkungkung dalam ruang domestik (Kurnia & Hidayat, 2020). Kebudayaan feodal tersebut berinteraksi dengan kebudayaan Sunda sehingga masuknya budaya patriarki dalam masyarakat Sunda. Penjajahan Belanda dan Jepang telah menyebabkan pergeseran kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan Sunda yang sebelumnya menjunjung tinggi perempuan bergeser menjadi

menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki karena pengaruh budaya asing. Penjajahan selanjutnya yakni penjajahan Mataram, pada masa ini terhadap budaya dan politik Sunda dan juga akibat dari kontak dengan budaya Arab jahiliyah. Kebudayaan tersebut membawa pengaruh patriarki dengan mengedepankan kedudukan laki-laki lebih terhormat dibandingkan perempuan (Istianah, 2020).

Secara tidak langsung konstruksi sosial dalam masyarakat Sunda tersebut menyebabkan “adanya paradigma perempuan ideal untuk menjadi seorang istri yang erat kaitannya dengan dapur, dandan dan ranjang.” (Zulaikha & Purwaningsih, 2019). “Perempuan dinilai ideal jika memiliki paras yang cantik, porsi badan yang proporsional, pintar masak, menurut kepada suami dan melayani suami lahir batin. Hal ini selain menimbulkan hilangnya kuasa atas diri, konstruksi budaya yang tercermin dalam peribahasa Sunda tersebut membentuk perempuan menjadi submisif, lemah, dan tidak mandiri secara finansial.” (Zulaikha & Purwaningsih, 2019)

Secara umum, dalam realitasnya faktor yang menyebabkan perempuan termarginalisasikan dalam sektor kehidupan, khususnya dalam politik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dalam diri perempuan itu sendiri yang tidak memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri perempuan, seperti laki-laki yang selalu ingin mendominasi untuk tetap menjadi pemimpin yang berdampak pada berbagai produk sosial budaya yang tidak berpihak pada perempuan. Kemudian, pandangan-pandangan lama yang kurang memberi peluang secara adil kepada perempuan (Zulaikha & Purwaningsih, 2019)

Hasil wawancara dari DR dari PAN, perempuan sunda yang saat ini menjadi anggota legislatif, pendidikan berperan penting dalam mendorong perempuan untuk tampil di dunia politik. Menurutnya saat ini pandangan patriarki sudah mulai bergeser, ruang bagi perempuan sangat terbuka lebar untuk terjun di dunia politik. Beliau mengemukakan selama duduk di kursi legislating, sebagai perempuan sunda mampu tampil percaya diri dan berkolaborasi dengan laki-laki dalam mengambil kebijakan publik. Hal tersebut pun tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga yang



memang sudah berpandangan terbuka mengenai peran perempuan di ranah publik. Peran keluarga dan pendidikan mampu mendorongnya untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas serta kemampuan untuk berkompetisi tanpa pandang gender.

Sejalan dengan hal itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan lainnya, NM (PPP) yang berasal dari kalangan pesantren dan sudah berhasil menjabat selama 3 periode sebagai anggota legislatif mengemukakan bahwa saat ini tidak ada hambatan berarti untuk perempuan tampil di dunia politik. Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil pendidikan dan organisasi, perempuan akan mudah masuk ke dunia politik. Permasalahan masih belum terpenuhinya 30% kuota perempuan di lembaga legislatif bukan diakibatkan oleh pandangan masyarakat yang masih patriarki, tapi lebih kepada diri perempuan itu sendiri dan modal politik yang dimilikinya. Permasalahan perempuan tidak jarang munculnya di dalam diri perempuan itu sendiri, seperti tidak berani, takut mencoba, takut gagal, takut didiskriminasi dan lain sebagainya. Padahal, faktanya saat ini tidak demikian. “Saat ini kan sudah menjadi rahasia umum ya untuk mencalonkan diri di lembaga legislatif pasti kita juga modal secara materil, yah paling permasalahannya disana, ungkapinya. NM juga menuturkan bahwa saat ingin tampil di dunia politik perempuan harus bisa meyakinkan dan membangun kepercayaan dengan masyarakat. Perempuan saat tampil di publik harus mampu menunjukkan bahwa kualitasnya tidak kalah dengan laki-laki dan mampu mengemban amanah dengan baik.

Kemudian, dari hasil wawancara dengan informan NY sebagai pengamat politik yang berjenis kelamin perempuan, menyatakan bahwa saat ini pandangan perempuan terhadap sebagai seorang pemimpin dan menduduki jabatan politik bukan menjadi hal yang tabu. Secara internal dalam diri perempuan sendiri sudah bisa berpikiran terbuka seiring dengan keterbukaan akses pendidikan, informasi dan komunikasi, serta lingkungan sosial yang semakin setara. NY mengungkapkan “Saat ini berbicara mengenai sosok pemimpin, baik laki-laki dan perempuan sudah bukan menjadi hal yang tabu, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apalagi saat ini sistem yang ada sudah semakin

demokratis dan terbuka. Bahkan di Indonesia sendiri keterlibatan perempuan pun sudah dijamin dan didorong melalui konstitusi dan mekanisme kebijakan dalam *affirmative action* ya”. Walaupun belum mencapai sepenuhnya dari yang ditargetkan, namun keterwakilan perempuan Sunda juga terus mengalami peningkatan setiap periodenya (KPU, 2019).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, YF sebagai pengamat politik yang berjenis kelamin laki-laki, memandang bahwa dari sudut pandang laki-laki melihat perempuan tampil dalam politik saat ini menjadi hal yang biasa dan sejatinya tidak ada diskriminasi. Perempuan yang terjun di dunia politik bahkan dapat menghadirkan transformasi kebijakan dan menjadi partner strategis dalam merumuskan berbagai kebijakan, dimana perempuan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan dari perspekti yang dimilikinya yang mungkin belum terpikirkan oleh perspektif laki-laki. NY mengutarakan, “Secara eksternal tidak ada hambatan patriarki yang menghalangi perempuan untuk tampil dalam dunia politik, apalagi berbicara konteks pemimpin hari ini, bahwa pemimpin semakin disadari sebagai sesuatu yang bukan merupakan titisan atau dibawa sejak lahir, namun konteks kepemimpinan adalah yang bisa diasah dan dibentuk. Apalagi sekarang di era yang semakin modern tentu ya ruang berpikir, berorganisasi dan membangun jaringan semakin terbuka. Bahkan, perempuan-perempuan yang sudah terlebih dahulu menonjolkan kepemimpinannya yang baik dan berhasil membawa transformasi positif di era ini tentukan dapat dengan cepat menebarkan inspirasi dan mengilhami perempuan-perempuan lainnya juga untuk tidak ragu mengembangkan kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peran perempuan di era modern saat ini sangat diakui keberadaannya. Pandangan patriarki sudah bergeser ke pandangan modern yang menghendaki kesetaraan, termasuk dalam dunia politik. Perempuan sudah diberi ruang yang besar dalam politik melalui berbagai mekanisme kebijakan. Begitupun halnya dengan lingkungan masyarakat sunda yang sudah mulai berpikiran terbuka, dimana perempuan sunda tidak hanya dipersespsikan untuk berperan dalam ranah domestik, namun juga dapat tampil di ranah publik. Di era modern ini

Gender bukan menjadi permasalahan keterpilihan perempuan menjadi pemimpin dalam politik. Namun, peluang keterpilihan dapat diperoleh dari modal yang dimiliki, seperti modal ekonomi dan sosial. Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap figur pemimpin Sunda dalam politik saat ini secara umum pendidikan dan keterlibatan dalam organisasi sejak dini menjadi modal yang dapat membentuk jiwa kepemimpinan perempuan. Pendidikan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan perempuan tentang dunia yang luas dan sejumlah permasalahan yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara langsung. Sedangkan organisasi mengasah keterampilan dan membentuk kepribadian pemimpin, seperti kemampuan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah.

## **Pembahasan**

### **Nilai-Nilai Kesundaan dalam Kepemimpinan Perempuan Sunda**

Perempuan sunda dalam kepemimpinan dapat mengambil nilai-nilai luhur kebudayaan sunda sejak zaman dahulu yang menempatkan perempuan pada posisi yang penting dalam kepemimpinan. “Perempuan dalam kepemimpinannya dituntut untuk lebih tenang dalam mengambil keputusan, tidak panik ketika menghadapi suatu kondisi walaupun dalam situasi yang genting sekalipun yang dalam falsafah Sunda diistilahkan *“tong kejut borosot”*, maksudnya seorang pemimpin janganlah mengambil keputusan cepat atau tergesa-gesa tanpa berpikir panjang mengenai dampaknya.” (Iskandar, 2016). Dalam kebudayaan Sunda terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan teladan dalam kepemimpinan. Dalam budaya Sunda, pemimpin yang baik itu harus bisa bersikap mandiri. Kemudian, seorang pemimpin juga harus memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya (Kurniasari, 2019).

Dalam istilah sunda, kepemimpinan perempuan Sunda juga harus menghindarkan diri dari istilah *“haripeut ku teuteureuyeun”*. Artinya, menjauhi sikap serakah, korupsi atau kolusi yang dapat menjadi sumber kerusakan bagi hajat hidup orang banyak. Dalam falsafah kebudayaan sunda, tatakrama harus dijunjung tinggi dalam kepemimpinan. “Seorang

pemimpin perempuan sunda harus memiliki sifat *cageur*, *bageur*, *bener*, *singer*, *pinter*. *Cageur* mengandung makna sehat jasmani dan rohani. *Bageur* berperilaku baik, sopan santun, ramah, bertata krama. *Bener* berarti jujur, amanah, penyayang dan takwa. *Pinter*, memiliki ilmu pengetahuan. *Singer* berarti kreatif dan inovatif.” (Engkoswara, 2002). Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang universal bagi seseorang dalam kepemimpinan. Perempuan sunda dapat menerapkannya dalam kepemimpinan dewasa ini.

Perempuan sunda yang menjadi anggota legislatif saat ini memiliki modal pendidikan dan pengalaman berorganisasi yang baik. Pendidikan berperan penting dalam mendorong perempuan untuk tampil di dunia politik. Saat ini pandangan patriarki sudah mulai bergeser ke pandangan modern. Ruang bagi perempuan sangat terbuka lebar untuk terjun di dunia politik. Perempuan sunda yang berhasil menduduki lembaga legislative mampu tampil percaya diri dan berkolaborasi dengan laki-laki dalam mengambil kebijakan publik. Hal tersebut pun tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga yang memang sudah berpandangan terbuka mengenai peran perempuan di ranah publik. Peran keluarga dan pendidikan mampu mendorong perempuan Sunda untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas serta kemampuan untuk berkompetisi tanpa pandang gender.

Saat ini tidak ada hambatan berarti untuk perempuan tampil di dunia politik. Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil pendidikan dan organisasi, perempuan akan mudah masuk ke dunia politik. Adapun permasalahan masih belum terpenuhinya 30 % kuota perempuan di lembaga legislatif bukan diakibatkan oleh pandangan masyarakat yang masih patriarki, tapi lebih kepada diri perempuan itu sendiri dan modal politik yang dimilikinya. Permasalahan perempuan tidak jarang munculnya di dalam diri perempuan itu sendiri saat pertama kali akan terjun dalam dunia politik, seperti tidak berani, takut mencoba, takut gagal, takut didiskriminasi dan lain sebagainya. Padahal, faktanya saat ini tidak demikian. Ketika perempuan mampu tampil meyakinkan dan membangun kepercayaan dengan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, maka keberadaannya akan diakui dengan baik. Perempuan saat

tampil di publik harus mampu menunjukkan bahwa kualitasnya tidak kalah dengan laki-laki dan mampu mengemban amanah dengan baik.

Pandangan patriarki sudah bergeser ke pandangan modern yang menghendaki kesetaraan, termasuk dalam dunia politik. Perempuan sudah diberi ruang yang besar dalam politik melalui berbagai mekanisme kebijakan. Begitupun halnya dengan lingkungan masyarakat Sunda yang sudah mulai berpikiran terbuka, dimana perempuan Sunda tidak hanya dipersespsikan untuk berperan dalam ranah domestik, namun juga dapat tampil di ranah publik. Di era modern ini, gender bukan menjadi permasalahan keterpilihan perempuan menjadi pemimpin dalam politik. Namun, peluang keterpilihan dapat diperoleh dari modal yang dimiliki, seperti modal ekonomi dan sosial.

Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap figur pemimpin Sunda dalam politik saat ini secara umum pendidikan dan keterlibatan dalam organisasi sejak dini menjadi modal yang dapat memebentuk jiwa kepemimpinan perempuan. Pendidikan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan perempuan tentang dunia yang luas dan sejumlah permasalahan yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara langsung. Sedangkan organisasi mengasah keterampilan dan membentuk kepribadian pemimpin, seperti kemampuan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah.

### **Peran Perempuan Sunda dalam Kepemimpinan Politik Era Modern**

Di era modern yang diwarnai dengan keterbukaan informasi dan komunikasi, sudah semakin tumbuh semangat demokrasi dan kesetaraan yang memberikan akses bagi semua orang untuk tampil dalam dunia publik. Seiring berkembangnya zaman, pandangan patriarki mengalami pergeseran pada pandangan modern yang menjunjung hak asasi manusia dan kesetaraan pada berbagai bidang kehidupan. Dampaknya terhadap kehidupan politik menjadi semakin terbuka. Dalam dunia politik, peran perempuan semakin diakui dan dibutuhkan dengan munculnya kesadaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (Rosen, 2017).

Sistem hukum di Indonesia telah memberikan jaminan dan dorongan partisipasi perempuan dalam politik. Dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan pembentukan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus menyertakan 30% untuk keterwakilan perempuan, serta pada Pasal 20 terdapat ketentuan untuk memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya dalam sistem pemilu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa daftar calon yang diajukan parpol memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Dalam masyarakat Sunda, secara umum modernisasi pun berpengaruh terhadap tingkat pendidikan perempuan yang pada akhirnya mendorong perempuan untuk tampil dalam urusan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Istianah (2020) saat ini banyak perempuan yang menuntut ilmu dan berkiprah di ruang publik. Tidak sedikit pula perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah, namun tetap dapat menjadi pelayan bagi anggota keluarga, tetapi dalam ruang lingkup rumah tangga posisinya tetap berada di bawah laki-laki. Dalam dunia politik saat ini perempuan Sunda sudah mulai banyak yang tampil seperti di lembaga legislatif, eksekutif, partai politik maupun organisasi-organisasi sosial, walaupun perempuan masih kurang menduduki jabatan-jabatan strategis. Posisi-posisi strategis seperti pimpinan partai politik, ketua komisi DPR dan menteri-menteri di lembaga eksekutif masih didominasi oleh laki-laki. Artinya secara kuantitas dan kualitas peran perempuan Sunda dalam politik harus ditingkatkan.

Begitupun pada DPR RI saat ini, peran perempuan di era modern sangat diakui keberadaanya. Pandangan patriarki sudah bergeser ke pandangan modern yang menghendaki kesetaraan, termasuk dalam dunia politik (Fakih, 2013). Perempuan sudah diberi ruang yang besar dalam politik melalui berbagai mekanisme kebijakan. Begitupun halnya dengan lingkungan masyarakat Sunda yang sudah mulai berpikiran terbuka, dimana perempuan Sunda tidak hanya dipersiapkan untuk berperan dalam ranah domestik, namun juga dapat tampil di ranah publik. Di era modern ini, Gender bukan menjadi permasalahan keterpilihan perempuan menjadi pemimpin dalam politik. Namun, peluang keterpilihan dapat diperoleh dari modal yang dimiliki, seperti modal ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan

dengan teori Habitus Pierre Bordieu dengan konsep: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, dimana untuk dapat memenangkan sebuah arena harus terdapat modal sosial, modal ekonomi dan modal budaya (Bourdieu, 2010).

Selain itu, berdasarkan pengamatan terhadap figur pemimpin Sunda dalam politik saat ini secara umum pendidikan dan keterlibatan dalam organisasi sejak dini menjadi modal yang dapat membentuk jiwa kepemimpinan perempuan. Pendidikan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan perempuan tentang dunia yang luas dan sejumlah permasalahan yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara langsung. Sedangkan organisasi mengasah keterampilan dan membentuk kepribadian pemimpin, seperti kemampuan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan teori sosial kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kartono, bahwa pemimpin itu dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan kemauan diri sendiri (Kartono, 2008). Artinya setiap orang bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang didapatkan dari hasil interaksi dengan lingkungannya seperti dalam pendidikan, organisasi serta kemauan dalam diri sendiri.

Dalam upaya membangun kepemimpinan perempuan dalam politik diperlukan kesadaran politik bagi perempuan itu sendiri. Kesadaran politik sebagai faktor utama seseorang melakukan partisipasi politik (Fatwa, 2016). Partisipasi politik merupakan bentuk kesadaran warga negara dalam peranannya bagi pembangunan bangsa. Kesadaran politik dipengaruhi oleh pengetahuan politik, minat, dan penilaian seseorang terhadap sistem pemerintahan yang sedang berlangsung (Surbakti, 1992). Oleh karena itu, dalam membangun kepemimpinan politik perempuan, perlu dibangun juga kesadaran politik yang dapat ditempuh melalui pendidikan baik secara formal di sekolah maupun non formal melalui komunitas maupun organisasi. *“Political knowledge is a central concept in the study of public opinion and political behavior”* (Barabas, 2014). Pengetahuan politik menjadi konsep penting dalam melahirkan perilaku politik. Di era modern, semakin banyaknya organisasi-organisasi atau ruang yang mewadahi perempuan untuk berdaya, maka dapat melahirkan salah satunya aktifis-aktifis perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam politik.

## **Analisis Proses Perubahan Konstruksi Sosial Pemimpin Perempuan Sunda.**

### **a. Eksternalisasi Konstruksi Sosial Pemimpin Perempuan Sunda**

Dalam teori konstruksi sosial, eksternalisasi merupakan proses adaptasi atau penyesuaian diri seseorang dengan dunia sosiokultural yang merupakan produk manusia. Proses eksternalisasi terjadi ketika sebuah pemikiran diimplementasikan ke dalam dunia seseorang. Pemikiran mengenai kesetaraan dan keadilan gender yang berkembang dengan melalui akses pendidikan yang semakin terbuka juga melalui berbagai gerakan feminis yang semakin membuka pemikiran perempuan mengenai kesetaraan, termasuk dalam dunia politik. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum perempuan Sunda yang berhasil menjadi pemimpin politik mereka berhasil mengadaptasi pemikiran-pemikiran mengenai kesetaraan dari lingkungan sosial kulturalnya. Mereka menyadari bahwa peran perempuan dibutuhkan dalam dunia politik dan perempuan memiliki kapabilitas untuk masuk dalam dunia politik. Dari proses eksternalisasi tersebut terjadi perubahan dari semua pemikiran yang menempatkan perempuan Sunda lebih layak apabila bereperan di ruang domestik, kemudian berubah karena adanya adaptasi terhadap nilai-nilai kesetaraan yang diakui dan dibenarkan sehingga teradaptasi dalam lingkungan sosial kultural. Hal ini kemudian menciptakan konstruksi sosial yang memosisikan perempuan juga diperlukan dan dapat berperan dalam ruang publik, termasuk dalam politik.

### **b. Objektifikasi Konstruksi Sosial Pemimpin Perempuan Sunda**

Objektifikasi merupakan proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang mengalami proses insitutionalisasi. Proses objektifikasi terjadi ketika pemikiran atau gagasan yang berkembang masuk ke dalam dunia sosial dan kemudian menjadi bagian dari kesadaran orang lain, hingga pada akhirnya menjadi sebuah kebenaran dan normalisasi. Konstruksi sosial yang terjadi dalam kepemimpinan perempuan di dunia politik tidak terlepas dari nilai-nilai yang mengalami pelembagaan sehingga pada akhirnya dinormalisasi. Dari sebelumnya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki lebih layak menjadi seorang pemimpin dibandingkan perempuan. Kemudian, berubah seiring dengan



berkembangnya pemikiran mengenai kesetaraan yang kemudian juga terwujud dalam sebuah gerakan institusional. Terdapat organisasi-organisasi yang secara khusus bergerak dalam pemberdayaan perempuan juga organisasi yang secara umum turut mengakomodasi peran perempuan secara tidak langsung berhasil menciptakan ruang kesadaran bahwa kepemimpinan juga dapat ditempati oleh perempuan dan kemudian membuka kesadaran lebih bahwa perempuan layak menempati posisi-posisi dalam dunia politik. Berdasarkan hasil temuan, secara umum perempuan Sunda yang berhasil menjaid pemimpin dalam politik tidak terlepas dari nilai-nilai dan pengalaman berkecimpung dalam dunia organisasi yang membuka pandangan lebih jauh mengenai peranannya dalam politik. Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai bahwa hak memimpin adalah hak yang dapat diperoleh secara setara baik oleh laki-laki maupun perempuan telah dinormalisasi, sehingga perempuan Sunda pun memiliki motivasi untuk tampil sebagai pemimpin dalam politik.

c. Internalisasi Konstruksi Sosial Pemimpin Perempuan Sunda

Proses internalisasi terjadi ketika suatu fenomena sosial terus berkembang dan tanpa sadar diakui kebenarannya sehingga menjadi sebuah pemikiran atau kebiasaan yang turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dari proses objektivikasi yang berhasil menormalisasikan nilai-nilai kesetaraan dalam kepemimpinan, kemudian dapat mengokohkan suatu nilai tersebut sehingga terinternalisasi secara terus menerus. Proses internalisasi kepemimpinan perempuan sebagai suatu hal yang normal dan diterima secara umum, tidak terlepas dari proses identifikasi akan nilai-nilai kepemimpinan yang berhasil dikembangkan oleh perempuan. Dari hasil temuan, perempuan Sunda yang menduduki kursi legislatif saat ini umumnya memiliki karakteristik tersendiri dalam kepemimpinannya, seperti lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi, lembut, tekun, ulet dan bisa mengkaji suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang dan dapat lebih mudah merangkul dan menampung aspirasi dengan masyarakat dengan kedekatan emosional dengan pendekatan silaturahmi dan kedekatan emosional yang terbangun sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan dan dukungannya. Hal ini membuktikan bahwa saat ini kepemimpinan perempuan dalam politik tidak dapat

dikesampingkan dan peran perempuan dalam politik semakin diakui (Wahyudi, 2018). Sejalan dengan pendapat Jacobus (2016) peran aktif perempuan dalam politik tersebut akan mengefektifkan pembuatan kebijakan publik sehingga terwujudnya kehidupan yang demokratis. Keberhasilan perempuan Sunda dalam kepemimpinan ini secara tidak langsung menggeser konstruksi sosial dari sebelumnya menempatkan laki-laki lebih pantas memimpin dengan segala keunggulannya terkonstruksi secara sosial, menjadi terbangunnya konstruksi sosial yang menempatkan kepemimpinan dapat ditempati oleh laki-laki maupun perempuan dengan masing-masing karakteristik yang dimikinya. Bahkan dalam kepemimpinan politik saat ini terbangun konstruksi sosial, bahwa perempuan dan laki-laki adalah partner strategis dalam merumuskan kebijakan publik.

## **KESIMPULAN**

Perempuan Sunda memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dengan nilai-nilai kesundaan yang luhur. Meskipun peran perempuan Sunda dalam ranah publik telah mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh aspek sosiologis dan budaya pada masyarakat, era modern yang diwarnai dengan keterbukaan informasi dan komunikasi serta semangat demokrasi dan kesetaraan telah memberikan akses bagi semua orang untuk terlibat dalam politik. Analisis kepemimpinan perempuan Sunda di lembaga legislatif saat ini menunjukkan bahwa perempuan Sunda memiliki akses yang sama untuk terjun dalam dunia politik tanpa meninggalkan kewajibannya di ranah domestik. Hal ini dapat dicapai melalui proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi nilai-nilai kesetaraan dalam kepemimpinan. Proses tersebut berhasil mengubah konstruksi sosial yang sebelumnya menempatkan laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin dibandingkan perempuan.

Saat ini, terdapat konstruksi sosial yang menempatkan kepemimpinan dapat ditempati oleh laki-laki maupun perempuan dengan masing-masing karakteristik yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik melalui lingkungan masyarakat,

pendidikan, dan organisasi yang mendorong perempuan memiliki modal untuk tampil sebagai pemimpin di politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barabas, et. al. (2014). The Question(s) of Political Knowledge American Political Science Review. *American Political Science Review*, Vol 108, No.4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0003055414000392>
- Batuwael, G. E., Sialana, F., & Tuharea, J. (2023). Persepsi masyarakat Wahaeolon terhadap Peran dan Kedudukan Perempuan Modern di Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 100-107.
- Bourdieu, Pierre, (2010). *Arena Produksi Kultur*. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi wacana
- Engkoswara, (2002). *Lembaga Pendidikan Sebagai Pusat Pembudayaan: Hidup Harmoni di Keluarga, Sekolah dan di Masyarakat*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
- Fakih, Mansour. (2013) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Fatwa, A. N, (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, No. 4, 16–20.
- Haddad & Hijran, (2017). Model Kepemimpinan Politik Sunda Dalam Konteks Pendidikan Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN, 2598, 5973*.
- Haq dkk. (2023). Eksistensi Perempuan Sunda Berdasarkan Dimensi Sunan Ambu dalam Epos Lutung Kasarung. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1). Doi <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.24087>
- Hartono, Rudi, (2021). Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1. E-ISSN : 2774-9975
- Haryani, (2010). Perempuan dalam Budaya Patriarki: Kajian Semiotika Sosial dalam Cerpen Sunda Berjudul “Si Bocokok”. *Jurnal Ensains*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.31848/ensains.v3i1.299>
- Heryana, (2012). Mitologi Perempuan Sunda. *Jurnal Patanjala*, Vol. 4, No. 1, 156-169
- Iskandar. (2016), *Manajemen dan Budaya Perpustakaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Istianah, (2020). Perempuan dalam System Budaya Sunda: Peran dan Kedudukan Perempuan di Kampung Geger Hanjuang Leuwisari

- Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol. 17, No. 2. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v17i2.9328>
- Jacobus. (2016). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Kafidhoh, S. (2019). Kepemimpinan Perempuan Dalam Pendidikan Islam. *Alim/ Journal of Islamic Education*, 1(2), 427-462.
- Kartono, Kartini, (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kirwanto, K, (2018). Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji. *Undergraduate Thesis*: UIN Raden Intan Lampung.
- KPU. (2019). Laporan Penelitian Keterwakilan Perempuan. Diakses dari <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/36/17>, 19 Januari 2023.
- Kurnia & Hidayat. (2020). Potret Perempuan Menak Sunda dalam Novel Dewi Sartika Karya E. Rokajat Asura. *Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, 10(2).
- Kurniasari. R (2019). Kepemimpinan Perempuan Yang Bernilai Kesundaan Sebagai Jawaban Tantangan Globalisasi. *Institutional repositories & scientific journals*.
- Larashati, L. (2022) Ketimpangan Dan Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Sdgs (*Sustainable Development Goals*). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2).
- Mauliyah & Sinambela. (2019). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 12(1). Doi <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.7>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Mulia, (2011). *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja.
- Patimah, Tripani. (2022). *Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemenuhan Aspirasi Perempuan*. Skripsi. Bandung: Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Priandi & Roisah, (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No. 1, 106-116.
- Rosen, J, (2017). Gender quotas for women in national politics: A comparative analysis across development thresholds. *Social Science Research*, Elsevier, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X17300844>

- Saputri, W., & Mardijono, H. A. (2023). Syarat Berpenampilan Menarik Pada Pendaftaran Calon Mahasiswa Sebagai Salah Satu Diskriminasi Di Dunia Pendidikan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 569-583.
- Sastrawati, Nila (2018) *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Berbedah Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press.
- Suarmini, et. al. (2021). Relationship Between Woman-Voters' Characteristics and Participation In Politics To Their Preferences. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(3).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, R, (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Wadanabun, et. al. (2020). Perjuangan Perempuan Dalam Arena Politik (Studi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Dalam Prespektif Pierre Bourdiue). *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 9, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43026>
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Politea: *Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Zulaikha, (2019). Representasi Identitas Perempuan dalam Ranah Domestik—Sebuah Kajian Semiotika Budaya pada Peribahasa Sunda. *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 14(3), 341-352.